

**PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN GADIS DALAM KARUNG
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**DEVICHA NATRI DWI PASTY
NPM. 5116500049**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019**

**PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN GADIS DALAM KARUNG
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL)**

**Devicha Natri Dwi Pasty
NPM. 5116500049**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

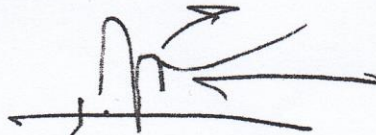
Tegal, November 2019

Pembimbing I



**Siswanto , S.H.,M.H
NIDN. 0013126401**

Pembimbing II



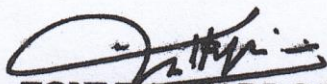
**Dr. Sanusi, S.H.,M.H
NIDN. 0609085202**

**PERANAN SATUAN RESEKSE KRIMINAL DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
GADIS DALAM KARUNG
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL)**

**Devicha Natri Dwi Pasty
NPM. 5116500049**

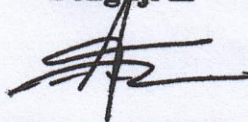
Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Penguji I



**TONI HARYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801**

Penguji II



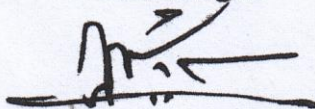
**FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702**

Pembimbing I



**SISWANTO, S.H., M.H
NIDN. 0013126401**

Pembimbing II



**DR. H. SANUSI, S.H., M.H
NIDN. 0609086202**

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devicha Natri Dwi Pasty
NPM : 5116500049
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang/ 8 Agustus 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERANAN SATUAN RESERSE
KRIMINAL DALAM
MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
GADIS DALAM KARUNG
(STUDI DI WILAYAH HUKUM
POLRES TEGAL)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, November 2019

Yang menyatakan

A green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL 23', 'C0000AAC00000001', '6000', and 'ENAM RIBURUPIAH'. A black ink signature is written over the stamp.

(Devicha Natri Dwi Pasty)

ABSTRACT

The rise of the crime of murder is very necessary the role and duties of the authorities, one of which is the police. Various kinds of criminal cases have occurred, especially in this Tegal Regency. One of the interesting cases or cases is the criminal case of the murder of the girl in a sack. On August 9, 2019 residents discovered a body that had been left with bones and legs and hands bound in a sack in Cerih Village, Jatinegara District, Tegal Regency.

This study aims to: (1) Determine the role of the Criminal Investigation Unit in uncovering the criminal act of killing a girl in a sack that occurred in the Tegal District Legal Area. (2) Knowing the obstacles and solutions of the Criminal Investigation Unit in uncovering the crime of killing a girl in a sack that occurred in the Tegal Regional Police Legal Area.

This type of research is field research. The approach used is empirical juridical. Data collection techniques through interviews and documentation are then analyzed with qualitative data analysis.

The results of this study indicate: (1) The role of the Criminal Investigation Unit in the Tegal Police jurisdiction is very important, due to the case of the discovery of a corpse by residents of Tegal district who had been decomposed in a sack and had only lived bones so it had to be revealed. (2) The obstacle in disclosing the discovery of the corpse is because the corpse has been decaying for around 4-5 months and the limitation of witnesses in the vicinity, because the place of discovery of the corpse is an empty house that has long been abandoned by its owner. The solution was for the police to call the victim's family, friends / playmates of the victim and the operational team / Resmob Tegal Police Station to check the latest IT / telecommunications of the victim and that's where the operational team / Resmob Police Station Tegal managed to uncover.

Based on the results of this study it is hoped that the Tegal Police will increase counseling and guidance to residents regarding the dangers of committing criminal acts and sanctions that will be imposed on the perpetrators.

Keywords: Role, Criminal Investigation Unit, Crime, Girl Murder, Sack.

ABSTRAK

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang salah satunya adalah kepolisian. Berbagai macam kasus kriminal telah banyak terjadi, khususnya di Kabupaten Tegal ini. Salah satu kasus atau perkara yang menarik adalah kasus pidana pembunuhan gadis dalam karung. Pada tanggal 9 Agustus 2019 warga menemukan jasad yang tinggal tulang belulang dengan kaki dan tangan terikat dalam karung di Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui peranan Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal. (2) Mengetahui kendala serta solusi Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan yuridis empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peranan Satuan Reserse Kriminal di wilayah hukum Polres Tegal sangatlah penting, dikarenakan adanya kasus penemuan mayat oleh warga kabupaten Tegal yang sudah membusuk didalam karung dan sudah tinggal tulang belulang jadi harus terungkap. (2) Kendala dalam pengungkapan penemuan mayat ini adalah dikarenakan mayat sudah membusuk selama sekitar 4-5 bulanan dan keterbatasannya saksi saksi yang di sekitar, dikarenakan tempat penemuan mayat tersebut adalah sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Solusinya adalah pihak kepolisian panggil keluarga korban, teman/ rekan bermain korban dan tim operasional/ Resmob Polres Tegal melakukan cek IT/ telekomunikasi terakhir korban dan di situlah tim operasional/ Resmob Polres Tegal berhasil mengungkapnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pihak kepolisian Polres Tegal agar meningkatkan penyuluhan dan pembinaan terhadap warga mengenai bahaya melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Kata Kunci : Peranan, Satuan Reserse Kriminal, Tindak Pidana, Pembunuhan Gadis, Karung.

MOTTO

*“Kebijakan dan kebijakan adalah perisai terbaik.”
(Aspinal)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu Penulis
- Saudara-saudara Penulis
- Teman-teman Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Allah SWT. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis Dalam Karung (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tegal)”. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Selama melaksanakan skripsi dan dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran, serta fasilitas yang membantu hingga akhir dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M. Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kanti Rahayu S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Dr. Sanusi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Imam Asmarudin S.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

6. Siswanto, S.H.,M.H dan Dr. Sanusi, S.H., M.H yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1.
8. Segenap pegawai administrasi/ karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Kedua Orangtua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
10. Teman-teman penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAC	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data	12
G. Rencana Sistematika Penulisan	13

BAB II	TINJAUAN KONSEPTUAL	15
A.	Tinjauan Tentang Peran	15
B.	Tinjauan Tentang Kepolisian	17
1.	Pengertian Kepolisian	17
2.	Tugas dan Wewenang Kepolisian	18
3.	Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)	22
C.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana	25
1.	Pengertian Tindak Pidana Menurut KUHP	25
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3.	Tindak Pidana Pembunuhan	30
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A.	Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis Dalam Karung Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Tegal	33
B.	Kendala Serta Solusi Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis Dalam Karung Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Tegal	51
BAB IV	PENUTUP	57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.¹

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang salah satunya adalah kepolisian.² Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana

¹ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 56.

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Dalam rangka melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh Polri, dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal. Sebagai aparat penegak hukum, maka Kepolisian patut mendapatkan perhatian lebih. Hal ini didasarkan pada pemikiran apakah Kepolisian khususnya Reserse tersebut cukup efektif berperan dalam mengungkap kasus-kasus kriminal yang banyak terjadi dalam masyarakat, melihat asumsi ataupun pandangan masyarakat yang cenderung bersikap apriori terhadap kinerja Kepolisian secara umum.

Berbagai macam kasus kriminal telah banyak terjadi, khususnya di Kabupaten Tegal ini. Salah satu kasus atau perkara yang menarik adalah kasus pidana pembunuhan gadis dalam karung. Pada tanggal 9 Agustus 2019 warga menemukan jasad yang tinggal tulang belulang dengan kaki dan tangan terikat dalam karung di Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Korban

diduga meninggal sekitar 4 bulan yang lalu sehingga hanya menyisakan tulang belulang saja. Korban dibunuh oleh lima orang pelaku, kelima pelaku diantaranya adalah kekasih dan saudara korban. Para pelaku secara bersama-sama menghabisi NH setelah sebelumnya berhubungan intim dengan korban. Pembunuhan dilakukan secara spontan dilakukan dengan cara dicekik dikarenakan adanya cekcok antara korban dan salah satu pelaku dan mereka dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras.³

Selanjutnya, pada tanggal 20 Agustus 2019 kelima pelaku diminta memperagakan proses dari mereka bertemu korban hingga terjadinya pembunuhan yang disebut sebagai rekontruksi. Rekontruksi dilakukan di lapangan Aspol, saat digelar rekonstruksi sikap pelaku membuat geram petugas. Para pelaku bertingkah konyol di hadapan petugas dan bersikap tidak adanya penyesalan karena terlihat masih sempat bercanda. Rekonstruksi pembunuhan itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi berkas perkara di Kejaksaan negeri.⁴ Setelah motif pembunuhan tersebut terkuak pelaku diancam Pasal 80 ayat (3) tentang undang-undang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun dan Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dan pemberatan. Ada dua pelaku di bawah umur namun tidak dapat dilakukan didiversi karena ancaman pidana lebih dari 7 tahun,

³ <https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/12/misteri-penemuan-jasad-tinggal-tulang-di-tegal-terkuak-salah-satu-pelaku-ternyata-saudara-korban> diakses pada 16 September 2019.

⁴<https://bogor.tribunnews.com/2019/08/21/bikin-polisi-geram-begini-kelakuan-5-pembunuh-gadis-yang-jasadnya-tinggal-tulang-saat-rekonstruksi> diakses pada 16 September 2019.

tetapi untuk pelaku yang usianya masih di bawah umur akan diproses melalui Bapas Pelakongan.⁵

Tindak pidana gadis dalam karung tersebut sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan sangat susah untuk dilakukan pengungkapan ini membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian khususnya Polres Langkat, jadi dengan keberadaan institusi kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum.⁶

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.⁷

⁵ <https://bogor.tribunnews.com/2019/08/16/terkuak-motif-pembunuhan-gadis-dalam-karung-pelaku-terancam-hukuman-20-tahun-penjara> diakses pada tanggal 16 September 2019.

⁶ Iyus, "Peran dan Tugas Pihak Kepolisian", <http://issuu.com/waspada/docs/waspada>, diakses pada tanggal 17 September 2019.

⁷ *Ibid.*.

Hal ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Polres Tegal untuk mengungkapkan dan memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pihak kepolisian khususnya Polres Tegal.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Satuan Reserse Kriminal dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis dalam Karung (Studi di Wilayah Hukum Polres Tegal)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal?
2. Apa saja kendala serta solusi Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui peranan Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal.
2. Mengetahui kendala serta solusi Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini kiranya dapat memberi manfaat kepada pembaca baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya peranan Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat dan penegak hukum khususnya Satuan Reserse Kriminal yang berkaitan tentang peranan satuan reserse kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menyajikan penelitian yang pernah dilakukan sebelum terkait dengan Peranan Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung, penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

Penelitian Willa Maysela F (2015) dengan judul Peranan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Metode Dactiloscropy. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi teknis Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum khususnya di wilayah hukum Polda Riau merupakan salah satu fungsi yang sangat spesifik dalam organisasi Polri, yang peranannya adalah sebagai salah satu unsur bantuan teknis penyidikan tindak pidana menuju terciptanya proses penyidikan secara ilmiah. Peran aktif Unit Identifikasi itu sendiri dimulai dari mulai penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai pada saatnya nanti bukti-bukti yang diperoleh pada saat proses penyidikan dan penyelidikan berlangsung, dikumpulkan dan dipertanggung jawabkan di pengadilan.⁸

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Ganang Dwinanda .W (2017) berjudul Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam

⁸ Willa Maysela F, "Peranan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Metode Dactiloscropy", *JOM Fakultas Hukum*. Vol 1 Februari 2015. (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4314/4199>), hlm. 1-15.

Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi (Studi Kasus di Polda Lampung). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yaitu : Pemeriksaan di tempat kejadian perkara tindak pidana dengan menggunakan ilmu bantu kedokteran kehakiman, yang mencakup penentuan lama kematian, cara kematian, sebab kematian, dan pembuatan Visum et Repertum, lalu, pemanggilan atau penangkapan tersangka setelah jelas dan cukup bukti, Penangkapan terhadap tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap pelaku, Penyitaan berbagai barang bukti yang akan memperkuat berita acara, Pemeriksaan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan, Pembuatan berita acara, yang meliputi berita acara penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat, Pelimpahan kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Wempi H. Potale (2016) yang berjudul Peranan Satuan Reserse Kriminal Umum Polsek Airmadidi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Reserse Kriminal berfungsi sebagai penyelidikan mendahului tindakan-

⁹ Ganang Dwinanda .W, "Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi (Studi Kasus di Polda Lampung)", Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017. (<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1007/840>), hlm. 1-16.

tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan kegiatan olah TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, pengumpulan barang bukti, penanganan korban, saksi, dan pelaku, pengorganisasian olah TKP, dan akhir penanganan TKP yang terdiri dari konsolidasi, pembukaan/ pembebasan TKP, pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP, dan evakuasi kegiatan.¹⁰

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang peranan Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal belum pernah dilakukan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan cermat dengan terjun ke lapangan langsung untuk mengetahui jawaban dari narasumber terkait peranan Satuan Reserse Kriminal dalam

¹⁰ Wempi H. Potale, "Peranan Satuan Reserse Kriminal Umum Polsek Airmadidi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan", *Journal Scientia De Lex*, Vol 4 No 3, 2016 (<https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/18/11>), hlm. 13-26.

mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis. Pendekatan empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹¹ Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui peranan Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini metode yang penulis gunakan bersumber dari data primer dan sekunder.

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 51.

informasi-informasi atau keterangan - keterangan.¹² Dalam penulisan hukum ini, untuk menggali data dari para informan penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga obyek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti. Informan adalah obyek penting dalam sebuah penelitian. Informan sebagai narasumber dalam penelitian ini, yaitu anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti-meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

¹²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm.81.

¹³Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 11.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Sebelumnya penulis telah menyiapkan pertanyaan sehingga wawancara tersebut dapat dilakukan secara terstruktur dan memperoleh data yang teliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari melalui data-data tertulis melalui arsip-arsip termasuk buku-buku tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹⁴ Dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹⁵ Pengolahan dan penyajian data merupakan langkah rasional yang perlu sekali dilaksanakan di dalam rangkaian penelitian, setelah data yang diperlukan diperoleh. Langkah yang dimaksud adalah melakukan penyusunan bentuk

¹⁴Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 102.

¹⁵Tatang M. Aminrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134.

(konstruksi) data melalui cara-cara tertentu sehingga data tersebut dapat berfungsi untuk memberikan gambaran secara jelas.

Data primer dan sekunder yang telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif. Dalam analisis ini akan mengumpulkan, menarik garis-garis logis menjadi ikatan pengertian tertentu. Analisis ini dilakukan atas data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data ini diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk penulisan hukum. Data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen terkumpul, lalu dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.¹⁶

G. Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 10.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

Bab II merupakan pengembangan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu peranan Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan gadis dalam karung yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Tegal.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan tampak jelas disusun sesuai dengan urutan rumusan masalah yang pembahasannya telah dikonstalisasikan dengan tinjauan konseptual.

BAB IV PENUTUP

Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah serta saran yang diberikan penulis setelah penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Peranan

Peranan berasal dari kata peran, yang berarti serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.¹⁷ Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁸

Peranan terdiri dari: 1) *Prescribed roles*, ialah peranan yang telah ditetapkan sebelumnya dan 2) *Expected roles* (peranan ideal) dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan. Dan interaksi kedua macam peran tersebut membentuk *Perceived roles* (peran faktual).

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan,

¹⁷ Friedman, M., *Keperawatan Keluarga Teori dan Praktik*, Edisi 3, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1998, hlm. 286.

¹⁸ E. St Harahap, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, 2007, hlm. 854.

yaitu: harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.¹⁹

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.²⁰ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²¹

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Pengertian peranan (*role*) menurut Komaruddin antara lain yaitu :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam manajemen.

¹⁹ H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 23

²⁰ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014, hlm. 62

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 854.

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.²²

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa :

1. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.²³

B. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²² Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 768.

²³ Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1990, hlm. 221.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Adapun fungsi dan tujuan Kepolisian di negara ini tidak lain adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat tentunya menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri tercantum dalam Pasal 13 secara rinci yaitu : a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.; b) Menegakkan hukum dan juga c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semuan tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian .
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, warga masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum di tanganni oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian dalam hal melaksanakan tugas-tugas tersebut secara umum berwenang untuk²⁴ :

- a. Menerima laporan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbunya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertema di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

²⁴Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk²⁵ :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

²⁵ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)

Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, menjelaskan mengenai Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam pasal tersebut dikatakan: “Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse criminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)”.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PNS).²⁶

²⁶Pasal 43 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidik dan pelayanan umum.
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada Unit Reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres.
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.²⁷

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) mempunyai beberapa organ. Organ-organ tersebut masing-masing mempunyai tugas tersendiri dalam rangka terlaksananya tugas Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)

²⁷ Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun organ atau unsur Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, sebagai berikut²⁸ :

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnas), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁸ Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaar feit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bawa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)²⁹.

Di dalam perundang-undangan juga menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit*, yang antara lain dikemukakan oleh Sudarto adalah sebagai berikut³⁰ :

1. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14;

²⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.

³⁰ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2012, hlm 91-92.

2. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen;
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
5. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, semisal:
 - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan.

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi *strafbaar feit* adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³¹ Sedangkan Van Hamel memberikan definisi tentang *strafbaar feit* sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hal-hal orang lain.³²

D. Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab.³³ Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi, tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

³¹ Hilaman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 21

³² EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika, 2003, hlm. 102

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 61

³⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 99.

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Setiap tindak pidana yang ada di dalam KUHP, dapat dijabarkan ke dalam unsur yaitu sebagai berikut³⁵ :

a. Unsur pokok objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif, adalah sebagai berikut :

a. *Act* adalah perbuatan aktif yang disebut perbuatan positif dan ;

b. *Omission* adalah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2) Akibat perbuatan manusia. Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3) Keadaan-keadaan. Pada umumnya keadaan-keadaan dibedakan atas :

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan;

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan

³⁵ *Ibid*, hlm 9.

terdakwa dari hukuman. Sikap melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

- b. Unsur pokok subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas pokok hukum pidana adalah “tidak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*schuld*).³⁶
 - 1) Kesengajaan, menurut para pakar ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :
 - a) Sengaja sebagai maksud;
 - b) Sengaja sebagai kepastian; dan
 - c) Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).
 - 2) Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, ada 2 (dua) bentuk kealpaan yaitu :
 - a) Tidak berhati-hati; dan
 - b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.
- c. Unsur melawan hukum. Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu ke dalam dua macam yaitu :
 - 1) Sikap melawan hukum formal. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam

³⁶Lenden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991, hlm. 4.

rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut juga harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis); dan

- 2) Sikap melawan hukum material. Menurut ajaran sifat melawan hukum material, disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

3. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut³⁷.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat

³⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Pembunuhan disebutkan dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan Pasal 340 KUHP, berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.³⁸

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan antara lain : unsur subyektif yaitu perbuatan dengan sengaja dan unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain³⁹.

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah

³⁸ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, hlm 357.

³⁹ Frangky Maitulung, “Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat”, *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013, hlm. 129.

perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu⁴⁰.

2) Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Adanya wujud perbuatan, (2) Adanya suatu kematian orang lain, (3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain⁴¹.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 57.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis Dalam Karung Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Tegal

Pengungkapan tindak pidana pembunuhan seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal tidaklah mudah karena korban baru ditemukan setelah sekian lama pembunuhan terjadi. Ini membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, jadi dengan keberadaan institusi Kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.

Baik buruknya citra suatu Negara hukum sebahagian turut ditentukan oleh kinerja Kepolisian negaranya. Kebutuhan pokok setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga Negara adalah terjaminnya kesejahteraan dan keamanan hidupnya. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan Negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah Negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.⁴²

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku pembunuhan tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan tersebut.

Hal ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Polri khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan,

⁴² Undang-Undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002.

serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal dan sudah diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. Di samping itu di dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Salah satunya adalah mengenai peranan Kepolisian, yaitu:

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara:

1. Peranan yang ideal: Pasal 1 ayat (2) yang isinya adalah: “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”.
2. Peranan yang seharusnya: Pasal 1 ayat (1) yang isinya adalah: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang tertentu bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”.

Pasal 2 isinya adalah:

- a. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:
 - 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - 2) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat

- 3) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
 - 4) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan
 - 5) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara
 - c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
 - d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara”.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam vS Belanda, demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Menurut Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gendraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*stafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴³ Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa

⁴³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Reneka Cipta, 1993, hlm. 56.

melanggar larangan tersebut.⁴⁴ Adapun yang menjadi alasan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana adalah:

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karenanya perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Seiring dengan banyaknya kejahatan yang terjadi maka diharapkan kepada Polisi yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menanggulangi dan mengungkap kejahatan di kota-kota besar, keterlibatan Polri dalam pengungkapan kejahatan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana dapat menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dalam

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehingga dalam memberantas kejahatan tersebut tidak lepas dari peranan yang dijalankan oleh pihak Kepolisian khususnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pihak Kepolisian telah membentuk satuan yang bertugas dalam memberantas kejahatan satuan tersebut diberi nama Reserse Kriminal (RESKRIM). Maka yang dikatakan Reserse Kriminal adalah satuan yang bertugas dalam mengungkap tindak pidana, mencari pelaku kejahatan, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya akan diproses secara hukum.

Dengan adanya satuan Reserse Kriminal ini akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, contohnya dalam kasus pemukulan apakah betul telah terjadi tindak pidana pemukulan maka akan di cari kebenarannya dan akan di usut tuntas oleh satuan Reserse Kriminal. Tugas dari satuan Reserse Kriminal ini refresif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik Reserse seperti pengamanan/ observasi, ini juga disebut “ *la Police en civile*” karena dalam tugasnya selalu menggunakan pakaian preman dan berbeda dengan Polisi yang lainya yang selalu menggunakan pakaian seragam dinas Kepolisian.⁴⁵

Berbeda dengan tugas Polisi administratif, Polisi Yudisial ini tindakannya selalu berdasarkan pada Undang-undang, seperti ketentuan Hukum Pidana (KUHP atau KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya, karena tugasnya banyak menyinggung hak-hak asasi yang bersifat

⁴⁵ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1991, hlm. 44.

refresif. Dengan adanya satuan Reserse Kriminal ini setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat akan di usut tuntas sampai pelakunya ditangkap dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya sehingga memberikan efek jera bagi si pelaku. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Reserse Kriminal di wilayah hukum Kabupaten Tegal dimana dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan memiliki peran yang sangat penting seperti dalma kasus pembunuhan gadis dalam karung dimana jasadnya baru ditemukan setelah beberapa bulan disimpan dalam karung. Peranan Satuan Reserse Kriminal di wilayah hukum Polres Tegal sangatlah penting, dikarenakan adanya kasus penemuan mayat oleh warga kabupaten Tegal yang sudah membusuk di dalam karung dan sudah tinggal tulang belulang jadi harus terungkap. Upaya Satuan Reserse Kriminal atau tim utamanya adalah tim operasional/ Resmob Polres Tegal memanggil keluarga korban dan teman/ kerabat dekatnya korban dan dimintai semua keterangannya dan dibuka IT/ telekomunikasi nomor HP korban terkakhir .dan di situlah muncul komunikasi korban dengan kelima pelaku tersebut.⁴⁶ Adapun langkah-langkah yang dilakukan pihak Kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal dalam menemukan dan mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan adalah:

1. Melakukan Penyelidikan

Setelah suatu peristiwa tindak pidana pembunuhan diketahui oleh pihak kepolisian maka pihak kepolisian segera melakukan suatu tindakan

⁴⁶ Wawancara dengan Bripda Roni, Penyidik Reskrim Polres Tegal, di Polres Tegal, tanggal 21 Oktober 2019 jam 13.00-15.00 WIB.

Penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut, kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dilanjutkan kegiatan penyidikan, penyelidikan ini dapat disamakan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pihak kepolisian yang menangani adalah Penyelidik Reserse, dimana yang berwenang untuk melakukan penyelidikan reserse adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang ditugaskan untuk menangani hal tersebut. Sasaran penyelidikan ialah orang, benda/ barang, tempat kejadian. Penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Reserse Umum dilakukan secara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila tim kesulitan dalam proses penyelidikan.

2. Melakukan Penyidikan

Penyidikan baru dapat dilakukan setelah selesainya proses penyelidikan yang ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, dengan diterimanya laporan polisi atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan, dalam melakukan tugasnya penyidik harus bertindak berdasarkan pada surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Setelah dikeluarkannya surat untuk melakukan penyidikan maka tim penyidik melakukan proses penyidikan dengan mengambil keterangan saksi-saksi terlebih dahulu ketika keterangan-keterangan dari saksi sudah didapatkan, keterangan saksi merupakan kunci untuk membuat terang suatu tindak pidana dan mengungkapkan siapa pelakunya dan menemukan identitas si pelaku, maka yang paling terpenting adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Berdasarkan penyidikan dalam kasus pembunuhan gadis dalam karung ini maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan adalah karena asmara yang sakit hati karena pelaku yang sudah mempunyai istri siri ini mempunyai hubungan asmara dengan korban, dan si korban demikian pula sudah mempunyai tunangan. Karena si korban sudah tunangan dan akan menikah si pelaku tidak terima dan terjadilah tindak pidana pembunuhan ini.
- b. Aktor-aktor dalam kasus pembunuhan gadis dalam karung adalah teman, aktor utamanya adalah pacar/ selingkuhan korban dan teman se-permainannya korban
- c. Modusnya adalah korban diajak jalan-jalan di sebuah tempat wisata lalu pelaku dan korban mencari rumah kosong untuk pesta minuman keras tersebut, kemudian setelah pelaku utama dan korban sudah setengah mabok terjadilah perbuatan mesum/ bersetubuh.
- d. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara yaitu pelaku utama mencekik lehernya dan dibantu 4 temanya diantara lain 2 perempuan dan 2 laki-

laki. Kedua perempuan tersebut membantu menahan kaki kanan dan kiri korban agar tidak terlalu banyak gerak kemudian 1 laki-laki memegang tangan kiri korban dan selanjutnya teman laki-laki yang satunya membantu mencekik korban dengan tali tas slempang si korban.

3. Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara

Begitu kita mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, yang mana tidak dilaporkan atau tidak dilaporkan Pihak Kepolisian khususnya Reserse Kriminal segera menuju TKP untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (perkap 14 tahun 2012), dari Olah TKP Kepolisian dapat mengetahui modus operandinya seperti apa, bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut. Dalam kegiatan gelar perkara bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi pertunjuk bagi pihak Kepolisian khususnya Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, kemudian mencari tahu apakah suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan pembunuhan sudah jelas merupakan peristiwa pidana, tetapi temuan mayat tersebut belum tentu suatu pembunuhan oleh karena itu tim penyidik mengumpulkan alat-alat bukti, mayat yang ditemukan tersebut bisa saja meninggal dunia karena penyakit, bunuh diri, atau merupakan peristiwa tindak pidana pembunuhan. Keberhasilan pengungkapan kasus-kasus pembunuhan diawali dari TKP, banyak informasi yang didapatkan dari olah TKP, dari Olah TKP dapat

diketahui siapa-siapa saja saksinya, modus operandinya, waktu kejadiannya dan tanggal berapa, mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa korban ke rumah sakit untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan tersebut, apakah ada sidik jari tersangka yang menempel di benda yang ditemukan di TKP, kemudian memberikan tanda garis pada letak posisi mayat. Ketika Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak steril lagi untuk dilakukannya Olah TKP maka akan sulit bagi Pihak Kepolisian khususnya Reserse Kriminal untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi terhambat.

4. Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan saksi merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan, dan keidentikan dari tersangka tentang barang bukti yang ditemukan maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Setelah laporan polisi diterima oleh penyidik, maka penyidik melakukan pemanggilan atau pemeriksaan saksi, sebelum melakukan pemeriksaan penyidik menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan pemeriksaan agar dimengerti oleh saksi. Pemeriksaan saksi dapat memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen Berita Acara Pemeriksaan sebagai alat bukti di kemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksiannya sendiri mengenai fakta yang dilihatnya sendiri.

5. Melakukan Visum/Otopsi

Visum merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, visum ini dilakukan oleh Kepolisian Khususnya Reserse Kriminal untuk mengetahui penyebab kematian dari korban, mayat tersebut diotopsi oleh Dokter Forensik untuk mengetahui penyebab kematian apakah kematian tersebut disebabkan adanya pukulan benda tumpul atau diracun, ditikam menggunakan pisau, dan dicekik menggunakan tali, sehingga pihak Kepolisian dapat menyimpulkan tentang kematian korban yang nantinya menjadi acuan untuk melakukan rekonstruksi tentang peristiwa pidana tersebut. Hasil Visum oleh Dokter, Pihak Kepolisian sudah memiliki 2 alat bukti yaitu saksi dan Surat Visum, dengan alat bukti tersebut pihak Kepolisian sudah mengetahui siapa pelakunya maka Pihak Kepolisian khususnya Reserse Kriminal akan melakukan penangkapan sesuai dari hasil laporan dan juga bukti-bukti yang lengkap.

6. Penangkapan

Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi dan terpenuhinya bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka maka akan dilakukan penangkapan, penangkapan dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Sebelum melakukan Penangkapan Petugas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan. Semua kegiatan

kepolisian berdasarkan KUHAP, kegiatan Kepolisian mulai dari penyelidikan hingga berita acara penangkapan harus dimuat dalam berita acara, setelah Pihak Kepolisian menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana maka petugas yang melakukan penangkapan harus menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana didasarkan pada permulaan bukti yang cukup, kemudian penangkapan tersebut dimuat dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap.

7. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas ke JPU

Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu, proses yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar berkas perkara memenuhi syarat, tersusun rapih dan sistimatis. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari, pembuatan resume, yaitu kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Kemudian dilanjutkan Penyerahan Berkas Perkara dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

Kebijakan dan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik hukum pidana yang juga merupakan bagian dari politik kriminal,⁴⁷ ialah “perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, politik criminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Hukum Indonesia tidak Onpartijdig, tapi partijdig, memihak kepada manusia dalam suatu arti yang luas, mengayomi masyarakat Indonesia, melindungi, memberikan kesejahteraan, baik kepada orang perorangan maupun kepada masyarakat secara luas. Keadilan dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menikmati rasa, cipta, dan karsa baik badaniah maupun rohaniah, pribadi ataupun golongan. Namun tidak jarang keadilan sulit dinikmati, sehingga kesamaan kodrat manusia terinjak-injak dan jauh dari keadilan.⁴⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut G. Pieter Hoefnagels dapat dilakukan dengan kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*” , dan kebijakan non penal (*non penal policy*).⁴⁹

⁴⁷ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 21.

⁴⁸ Edi Warman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1994, hlm 1-2.

⁴⁹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 50.

(1) Upaya Penal

Pengertian kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menurut Marc Ancel : “Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.” Kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.⁵⁰

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan secara penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁵¹

Sehubungan dengan hal ini, Ted Honderich berpendapat, bahwa pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 66.

⁵¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2002, hlm. 21.

- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya tindakan keadaan yang lebih berbahaya/ merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya kerugian yang lebih kecil.⁵²

Kebijakan penal selain mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan dan denda. Apabila pelaku adalah korporasi, maka terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum. Kebijakan penal penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan. Penegakkan hukum pada hakikatnya adalah penegakkan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben to permit*), dan menyimpangi (*derogieren to derogate*). Sarana penal atau upaya yang bersifat represif yaitu dilakukan setelah kejahatan itu terjadi dengan menggunakan hukum pidana berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman dan bertujuan untuk efek jera agar tidak terjadinya

⁵² *Ibid.*, hlm. 35.

kembali kejahatan tersebut dan memasyarakatkan pelaku agar diterima kembali di dalam masyarakat dengan sejahtera.

Kebijakan hukum yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan mengacu pada KUHP yang disesuaikan dengan pasal-pasal pembunuhan berdasarkan perbuatan pelaku, kebijakan hukum yang diterima adalah hukuman pidana maksimal berbagai pertimbangan juga perbuatan pelaku mengacu pada pasal-pasal 338 KUHP.

(2) Upaya Non-Penal

Upaya non-penal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materil dan imateril dari faktor-faktor krominogen. Upaya non-penal yang dilakukan oleh Reserse Kriminal Polres Tegal dalam rangka menanggulangi tindak pidana pembunuhan:

(1) Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya di dalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberi informasi dan arahan atau masukan kepada

masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana pembunuhan.

- (2) Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu aparat penegak hukum melakukan patroli setiap ada kegiatan yang berbau kemungkinan ada perjudian dan wajib berkunjung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan juga melakukan penjagaan yang kiranya dirasa akan terjadi perjudian togel dari tugas preventif (pencegahan) pokok polisi yaitu pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli-patroli. Melakukan deteksi-deteksi dini, dalam hal melakukan deteksi-deteksi dini dilakukan oleh satuan intelejen untuk mendeteksi kerawanan-kerawanan wilayah yang sering terjadi tindak pidana.

Kebijakan kriminal dalam menjalankannya, baik melalui upaya penal maupun upaya non-penal, keduanya harus dijalankan secara integral, yaitu adanya keseimbangan antara upaya penal dan upaya non-penal sehingga upaya yang dihasilkan tidak hanya bertahan sementara tetapi untuk jangka panjang. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut juga tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat karena kejahatan itu terjadi di masyarakat, sehingga laporan dari masyarakat lah dapat diketahui mengenai kejahatan pembunuhan yang telah terjadi.

B. Kendala Serta Solusi Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis Dalam Karung Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Tegal

Proses pengungkapan suatu tindak pidana pembunuhan guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian khususnya Reserse Kriminal menemui hambatan-hambatan dalam proses pengungkapannya yang menyebabkan sulitnya proses pengusutan apalagi kasus pembunuhan gadis dalam karung ini dilakukan sudah berbulan-bulan yang lalu dan baru terungkap setelah jasadnya hanya tinggal tulang belulang. Dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan tidak semudah yang diharapkan oleh semua pihak terkhusus Pihak Kepolisian dikarenakan pelaku kejahatan tidak ingin hasil perbuatannya diketahui oleh orang tentunya si pelaku akan menyembunyikan atau menghilangkan jejak/ barang bukti yang nantinya akan bisa membuat terungkapnya kejahatan yang dilakukannya.

Kendala dalam pengungkapan penemuan mayat ini adalah dikarenakan mayat sudah membusuk selama sekitar 4-5 bulanan dan keterbatasannya saksi saksi yang di sekitar, dikarenakan tempat penemuan mayat tersebut adalah sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Solusinya adalah pihak kepolisian panggil keluarga korban, teman/ rekan bermain korban dan tim operasional/ Resmob Polres Tegal melakukan cek IT/ telekomunikasi terakhir korban dan di situlah tim operasional/ Resmob Polres Tegal berhasil

mengungkapnya. Selain itu masih juga terdapat beberapa hambatan lain diantaranya:⁵³

1. Faktor Subtansi Hukum

Faktor aturan perundang-undangan atau subtansi hukum dapat menghambat peranan Reserse Kriminal (penyidik) Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah Pasal 183 KUHAP, dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa ynag bersalah melakukannya. Pasal 184 menyatakan bahwa alat bukti sah yang dimaksud, surat, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Kemudian ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor keaslian tempat

Perubahan tempat kejadian perkara, sebelum tim penyidik datang di lokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor:

⁵³ Wawancara dengan Bripda Roni, Penyidik Reskrim Polres Tegal, di Polres Tegal, tanggal 21 Oktober 2019 jam 13.00-15.00 WIB.

- a. Faktor Alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya hujan, panas, badai, banjir, dll.
- b. Faktor Manusia:
 - a. Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti
 - b. Rasa ingin ketahuan masyarakat sehingga masuk ke TKP
 - c. Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.
 - d. Laporan yang telat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat.
- 3. Kurangnya saksi yang diperoleh

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/ budaya hukum.

Kultur atau budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.

Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan dengan perbaikan pada aspek struktur dan substansi hukum yang diiringi dengan adanya budaya hukum (Culture Hukum).

Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/ kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.⁵⁴

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap tindak pidana apa lagi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Reserse Kriminal yang mana saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Masyarakat masih memiliki rasa ketakutan dan keengganan untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan, ketakutan tersebut disebabkan adanya ancaman dari pelaku yang tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menyaksikan perbuatan mereka. Kurangnya saksi yang diperoleh akan menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus pembunuhan, dengan kurangnya saksi yang diperoleh akan membuat pihak Reserse Kriminal akan bekerja lebih keras lagi dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah kepada pelaku kasus pembunuhan tersebut.

4. Faktor Penegak Hukum

⁵⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 10.

Masih banyaknya anggota Reserse Kriminal yang belum menguasai dan memahami serta penerapan teknik dan taktik penangkapan, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga sering ditemukan melakukan penangkapan tanpa menggunakan surat perintah penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, masih ditemukan adanya polisi yang salah tangkap terhadap orang yang bukan pelaku kejahatan, akibat kurang jelinya polisi atau terlalu gegabah dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian secara kuantitas masih terbatas jumlah penyidik sehingga dalam pelaksanaan proses penyidikan sedikit terkendala dengan kurang personil.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bertumpu pada pembahasan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Peranan Satuan Reserse Kriminal di wilayah hukum Polres Tegal sangatlah penting, dikarenakan adanya kasus penemuan mayat oleh warga kabupaten Tegal yang sudah membusuk di dalam karung dan sudah tinggal tulang belulang jadi harus terungkap.
2. Kendala dalam pengungkapan penemuan mayat ini adalah dikarenakan mayat sudah membusuk selama sekitar 4-5 bulanan dan keterbatasannya saksi saksi yang di sekitar, dikarenakan tempat penemuan mayat tersebut adalah sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Solusinya adalah pihak kepolisian panggil keluarga korban, teman/ rekan bermain korban dan tim operasional/ Resmob Polres Tegal melakukan cek IT/ telekomunikasi terakhir korban dan di situlah tim operasional/ Resmob Polres Tegal berhasil mengungkapnya.

2. Saran

Pihak kepolisian Polres Tegal agar meningkatkan penyuluhan dan pembinaan terhadap warga mengenai bahaya melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R., *Kriminologi*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, :Ghalia Indonesia, 2003.
- Aminrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2002.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Dwinanda, Ganang W, “Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi (Studi Kasus di Polda Lampung)”, *Jurnal Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
(<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1007/840>)
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991
- Friedman, M., *Keperawatan Keluarga Teori dan Praktik*. Edisi 3. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1998.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004
- Hadikusma, Hilaman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Harahap, E.St, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka, 2007.

<https://bogor.tribunnews.com/2019/08/16/terkuak-motif-pembunuhan-gadis-dalam-karung-pelaku-terancam-hukuman-20-tahun-penjara> diakses pada 16 September 2019.

<https://bogor.tribunnews.com/2019/08/21/bikin-polisi-geram-begini-kelakuan-5-pembunuh-gadis-yang-jasadnya-tinggal-tulang-saat-rekonstruksi> diakses pada 16 September 2019.

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/12/misteri-penemuan-jasad-tinggal-tulang-di-tegal-terkuak-salah-satu-pelaku-ternyata-saudara-korban> diakses pada 16 September 2019.

Iyus, “Peran dan Tugas Pihak Kepolisian”, <http://issuu.com/waspada/docs/waspada>, diakses tanggal 17 September 2019

Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Kanter, EY dan Siantur, SR, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika, 2003.

Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Maitulung, Frangky, “Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat”, *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013.

Marpaung, Lenden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.

Maysela, Willa F, “Peranan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Metode Dactiloscropy”, *JOM Fakultas Hukum*. Vol 1 Februari 2015. (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4314/4199>)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Reneka Cipta, 1993.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Mukmin, Hasan, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.
- Potale, Wempi H. “Peranan Satuan Reserse Kriminal Umum Polsek Airmadidi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan”, *Journal Scientia De Lex*, Vol 4 No 3, 2016 ([https:// ejournal.unpi.ac.id/ index.php/ scientia/ article/view/18/11](https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/18/11))
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1990.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1980.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2012.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- Warman, Edi, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1994.
- Wawancara dengan Bripda Roni, Penyidik Reskrim Polres Tegal, di Polres Tegal, tanggal 21 Oktober 2019 jam 13.00-15.00 WIB.